

**ANALISIS BENTUK-BENTUK KERJASAMA PETANI DENGAN
LEMBAGA-LEMBAGA PENDUKUNG PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS KAKAO DI KENAGARIAN SIKUCUR KECAMATAN V
KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

OLEH

WIRA NOVIATI RIDA
0810225215



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS BENTUK-BENTUK KERJASAMA PETANI DENGAN LEMBAGA-
LEMBAGA PENDUKUNG PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS KAKAO DI KENAGARIAN SIKUCUR
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung yang merupakan salah satu langkah dalam pengembangan agribisnis kakao. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2011. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan dengan petani untuk pengembangan agribisnis kakao dan menganalisis bentuk-bentuk kerjasama antara petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan sampel sebanyak 30 orang petani yang diambil secara sengaja (*purposive sampling*). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao diantaranya adalah : Bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan petani untuk pengembangan agribisnis kakao di hubungkan dengan Subsistem-subsistem agribisnis yaitu sebagai berikut : 1). Subsistem agribisnis hulu yaitu hubungan petani dengan pedagang saprodi dalam bentuk kerjasama spontan, hubungan petani dengan produsen pupuk, distributor dan pemerintah (subsidi pupuk) adalah interaksi kerjasama secara tidak langsung. Sedangkan hubungan petani dengan PPL dalam kerjasama langsung dan kerjasama asimilasi dan hubungan petani dengan kelompok tani yaitu Kerjasama asimilasi, 2). Subsistem agribisnis usahatani yaitu hubungan petani dengan kelompok tani, PPL, koperasi, LKMA, BRI/BPR dan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan lahan. Hubungan petani dengan koperasi adalah kerjasama asimilasi. Hubungan petani dengan LKMA adalah kerjasama asimilasi. Sedangkan hubungan petani dengan BRI/BPR adalah kerjasama kontrak. Hubungan petani dengan Dipertabun dan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan. Hubungan petani sampel dengan PPL dalam bentuk kerjasama langsung/pembinaan dan kerjasama asimilasi. Hubungan petani sampel dengan kelompok tani/Gapoktan yaitu kerjasama asimilasi dan hubungan petani dengan LSM dalam bentuk kerjasama kontrak, 3). Subsistem agribisnis hilir yaitu hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul, KPP dan Diskoperindag/Dipertabun. Hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul yaitu kerjasama spontan. Petani sampel bebas menjual kakaonya kepada pedagang pengumpul manapun, dan juga bisa menjual kepada KPP (koperasi produksi pertanian), dan hubungan antara petani sampel dengan KPP adalah penunjang kegiatan. Hubungan petani sampel dengan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terhadap penyedia lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor dan sebagainya (Soekartawi, 1995). Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan optimalisasi pengembangan sumber daya daerah melalui pengembangan usaha pertanian rakyat terutama komoditi ekspor yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi, baik dari segi jenis maupun mutu produk tersebut. Salah satu komoditi ekspor yang mempunyai prospek dan keunggulan komparatif tinggi yang perlu dikembangkan di daerah Sumatera Barat adalah komoditi kakao (Wijaya, 2006)

Kakao (*Theobroma cacao*) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Di samping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2002, perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sektor perkebunan setelah karet dan kelapa sawit (Goenadi, 2005).

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sedang giat dalam pengembangan komoditas kakao. Wijaya (2006) menyatakan kakao akan dijadikan komoditas andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjadi salah satu sumber devisa daerah. Kondisi tanaman kakao di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2008 adalah 61.464 Ha yang tersebar di beberapa kabupaten dengan produksi 32.376 ton dan untuk tahun 2009 telah mengalami peningkatan luas tanaman kakao menjadi 77.482 Ha dengan perkiraan produksi lebih kurang 48.000 ton (Dinas Perkebunan Sumatera Barat, 2009).

Agribisnis merupakan semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi, sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau suatu agroindustri, yang terkait satu sama lain. Di dalam pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem tidaklah dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara holistik. Hal ini mengisaratkan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional

baik langsung maupun tidak langsung harus melaksanakannya secara terpadu dan berkelanjutan. (Yasin, 2002).

Sistem agribisnis merupakan suatu gugusan industri (*industrial cluster*) yang terdiri dari beberapa subsistem yaitu : (1) subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), yakni industri sarana produksi (industri benih, pupuk dan pestisida, serta industri alsintan); (2) subsistem budidaya (*on-farm agribusiness*), menghasilkan komoditas pertanian primer (*farm product*); (3) subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*), yakni industri pengolahan baik menghasilkan produk antara maupun menghasilkan produk akhir (*final product*); (4) subsistem pemasaran, yaitu kegiatan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi; dan (5) subsistem jasa penunjang (*supporting system agribusiness*), yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif dengan pengembangan agribisnis (Sudaryanto dan Pasandaran, 1993 dan Ditjehort, 2001 *dalam* Saptana, *et.al*, 2004).

Tujuan pembangunan agribisnis adalah untuk meningkatkan daya saing komoditi pertanian, menumbuhkan usaha kecil menengah dan koperasi serta mengembangkan kemitraan usaha. Dengan visi mewujudkan kemampuan berkompetisi merespon dinamika perubahan pasar dan pesaing, serta mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yasin, 2002). Keberadaan kelembagaan dalam agribisnis kakao sangat penting, kelembagaan yang disiapkan dan dibina baik, akan berfungsi sebagai wahana proses belajar (*learning society*) bagi anggota, wahana untuk menajamkan masalah bersama yang dihadapi, wahana pengambilan keputusan untuk menentukan strategi menghadapi masalah bersama dan wahana memobilisasi sumber daya anggota. Kelembagaan juga dapat sebagai alat bagi anggota untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga secara bersama dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi (Nababan, 2002).

Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya merupakan salah satu langkah pengembangan agribisnis kakao yang harus terus menerus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena, pengalaman pembangunan pertanian yang dilakukan Negara-negara berkembang menunjukkan bahwa para petani tidak dianggap sebagai sumber informasi yang perlu dimanfaatkan bagi pembangunan pertanian. Informasi yang dimiliki petani, baik yang menyangkut teknologi pertanian maupun tata cara pemanfaatan sumber daya alam, oleh perencana pembangunan pertanian dianggap sebagai bukan informasi yang perlu dimanfaatkan, karena tidak ilmiah. Agar dapat berkelanjutan, pertanian harus mampu lebih peka terhadap pengetahuan penduduk yang dilayani (Soetrisno, 2006). Untuk itu perlu adanya pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian yang merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh

melalui kerjasama dengan petani untuk memperbaiki keragaan sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu sentra produksi kakao terbesar di Sumatera Barat dengan luas lahan pada tahun 2009 16.981 Ha (Lampiran1), dan produksi sebesar 6.992 ton dengan produktifitas 976,53 ton/Ha/tahun (Lampiran 2). Perkembangan komoditi kakao dari tahun 2004-2008 meningkat dengan signifikan baik dilihat dari luas lahan maupun produksinya. Luas tanaman kelapa di Kabupaten Padang Pariaman cukup besar yang berpotensi dijadikan untuk pengembangan kakao dengan dukungan ketersediaan lahan seluas 39.333 Ha dan sudah ditanam sampai tahun 2009 seluas 16.981 Ha dengan produksi 6.992 ton dengan produktifitas 976,53 ton/Ha/tahun (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, 2009).

Kegiatan pengembangan agribisnis kakao di Kabupaten Padang Pariaman ditujukan untuk meningkatkan produksi tanaman kakao, peningkatan pendapatan petani kakao dan meningkatkan nilai tambah produk kakao. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan peningkatan pemberdayaan masyarakat, sudah barang tentu perlu ada terobosan-terobosan yang terus digali melalui kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis komoditi kakao (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, 2009). Oleh karena itu, penelitian tentang analisis bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao menjadi penting untuk dilakukan.

1.2. Perumusan masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai melakukan program pengembangan tanaman kakao melalui penanaman kakao dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sentra produksi kakao sejak tahun 2005 dan dilanjutkan sampai saat ini. Daerah pengembangan agribisnis kakao tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman (Lampiran 2), sedangkan produksi kakao yang paling tinggi di Kabupaten Padang Pariaman adalah Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Selama ini kelembagaan perekonomian pedesaan dinilai oleh banyak ahli sangat rapuh dan dipandang sebagai penyebab kegagalan pengembangan perekonomian di pedesaan. Kerapuhan tersebut ditunjukkan oleh tidak efektifnya pemberdayaan faktor kepemimpinan (sebagai penggerak kemajuan) di pedesaan, tidak terbangunnya tata nilai yang menggerakkan kemajuan ekonomi di pedesaan, struktur dan keorganisasian ekonomi pedesaan yang dibiarkan rapuh, otonomi yang tidak mengangkat kedaulatan (politik) masyarakat pedesaan

dalam kegiatan ekonomi serta dibiarkannya faktor kompetensi sumberdaya manusia pedesaan terbelengkalai (Pranadji, 2003 *dalam* Hermanto, 2006).

Kelembagaan tani yang telah ditumbuh-kembangkan di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam selama kurun waktu dua tahun berjalan (2005-2006) antara lain: (1) Kelompok tani (2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan (3) Koperasi Produksi Pertanian (KPP). Petani yang berada di Sikucur membentuk kelompok tani, yang fungsinya agar mereka mendapat binaan dari penyuluh dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena bantuan dan binaan yang diberikan hanya untuk para kelompok tani dan bukan pada perorangan (petani), dari informasi yang didapatkan terdapat 11 jorong di Kenagarian Sikucur dengan 28 kelompok tani yang masing-masing anggotanya berjumlah \pm 25 orang. Dari sekian banyak kelompok tani yang ada baru 15 kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani yang disebut Gapoktan. Gapoktan adalah sebuah lembaga yang dibentuk dari 2 atau lebih kelompok tani. Di Kenagarian Sikucur ini sudah terbentuk 4 Gapoktan yaitu Gapoktan Awan Bajuntai, Gapoktan Koto Hilalang Sepakat, Gapoktan Sikucur Selatan dan Gapoktan Sikucur Jaya.

Petani kakao di Sikucur mendirikan koperasi untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan usahatani. Dalam pendirian koperasi tersebut petani dibimbing oleh Dinas Koperindag. Pendirian koperasi di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam ini telah dirintis sejak bulan Desember tahun 2000 yang dikhususkan untuk peningkatan produksi dan kualitas kakao yang dihasilkan penduduk setempat. Koperasi ini dinamakan Koperasi Produksi Pertanian (KPP) Awan Bajuntai, yang baru bergerak dalam usaha simpan pinjam. KPP Awan Bajuntai memberikan pinjaman hanya kepada Gapoktan, tetapi dananya tersebut untuk perorangan (petani), pemberian dana pinjaman mempunyai syarat-syarat, yaitu harus menjadi anggota koperasi, memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib.

Secara luas peran KPP Awan Bajuntai tidak hanya ditujukan kepada anggotanya saja, namun dapat juga hendaknya dirasakan oleh petani kakao yang lain di daerah setempat. Sejalan dengan misi koperasi yang seharusnya mampu mewartakan petani, maka harus diketahui bagaimana peran koperasi dan segala program-programnya mampu meningkatkan keuntungan bagi petani anggotanya, sehingga menarik minat petani lainnya yang bukan anggota untuk bergabung dengan koperasi tersebut. Peningkatan kemampuan petani dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung merupakan salah satu langkah dalam pengembangan agribisnis kakao yang harus terus diperhatikan. Dengan adanya kerjasama petani tersebut maka diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dapat berjalan

dengan lancar dan mendapatkan keuntungan dari pihak petani maupun lembaga-lembaga pendukungnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diajukan pertanyaan yaitu :

1. Siapakah pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan dengan petani untuk pengembangan agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
2. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Bentuk-Bentuk Kerjasama Petani Dengan Lembaga-Lembaga Pendukung Pengembangan Agribisnis Kakao Di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman”*

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan dengan petani untuk pengembangan agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam
2. Menganalisis bentuk-bentuk kerjasama antara petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menganalisis kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam. analisis yang dirumuskan dapat direkomendasikan kepada pihak pengambil kebijakan yang ada (Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). Di samping itu penelitian ini adalah sarana untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah didapat penulis juga dapat memberikan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan dengan petani untuk pengembangan agribisnis kakao di hubungkan dengan Subsistem-subsistem agribisnis adalah pedagang saprodi, pedagang pengumpul, Kelompok tani, Gapoktan/LKMA, Koperasi Produksi Pertanian (KPP) Awan Bajuntai, Diskoperindag, Dipertabun, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
2. Bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan petani untuk pengembangan agribisnis kakao di hubungkan dengan Subsistem-subsistem agribisnis yaitu sebagai berikut :
 - a. Subsistem agribisnis hulu yaitu hubungan petani dengan pedagang saprodi dalam bentuk kerjasama spontan, hubungan petani dengan produsen pupuk, distributor dan pemerintah (subsidi pupuk) adalah interaksi kerjasama secara tidak langsung. Sedangkan hubungan petani dengan PPL dalam kerjasama langsung dan kerjasama asimilasi dan hubungan petani dengan kelompok tani yaitu kerjasama asimilasi.
 - b. Subsistem agribisnis usahatani yaitu hubungan petani dengan kelompok tani, PPL, koperasi, LKMA, BRI/BPR dan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan lahan. Hubungan petani dengan koperasi adalah kerjasama asimilasi. Hubungan petani dengan LKMA adalah kerjasama asimilasi. Sedangkan hubungan petani dengan BRI/BPR adalah kerjasama kontrak. Hubungan petani dengan Dipertabun dan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan. Hubungan petani sampel dengan PPL dalam bentuk kerjasama langsung/pembinaan dan kerjasama asimilasi. Hubungan petani sampel dengan kelompok tani/Gapoktan yaitu kerjasama asimilasi dan hubungan petani dengan LSM dalam bentuk kerjasama kontrak.
 - c. Subsistem agribisnis hilir yaitu hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul, KPP dan Diskoperindag/Dipertabun. Hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul yaitu kerjasama spontan. Petani sampel bebas menjual kakaonya kepada pedagang pengumpul manapun, dan juga bisa menjual kepada KPP (koperasi produksi pertanian), dan hubungan antara petani sampel dengan KPP adalah penunjang kegiatan. Hubungan petani sampel dengan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan.

5.2. Saran

1. Koperasi Produksi Pertanian (KPP) Awan Bajantai harus lebih diaktifkan lagi sebagai lembaga pendukung yang berperan aktif sesuai dengan fungsi koperasi yaitu sebagai pemberi modal/pinjaman, penyalur input-input pertanian, sebagai lembaga pemasaran hasil-hasil pertanian dan sebagai penghubung dari semua sistem agribisnis.
2. Peran pemerintah setempat lebih aktif lagi dalam memperhatikan petani kakao dan lembaga-lembaga yang berada di sekitar petani kakao. Dengan adanya peran yang baik yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari lembaga-lembaga pendukung yaitu Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi, PPL dan Pemerintah (Dipertabun/Diskoperindag), maka akan dapat meningkatkan posisi tawar petani dan sekaligus pendapatan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2010. Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat: Beberapa Observasi. [jurnal]. <http://wordpress.LSM.go.id>. [1 Agustus 2011].
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. 2009. *Sumatera Barat dalam angka 2004-2008*
- Burhanuddin, S. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Departemen Pertanian (Deptan). 2007. c. Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK). <http://agribisnis.deptan.go.id>. [23 Desember 2009].
- Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Padang Pariaman. 2009
- Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Barat. 2009. *Perkembangan Luas Kakao Sumatera Barat*. Padang
- Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Barat. 2009. *Pedoman Standar Prosedur Operasional (SPO) Pasca Panen Kakao*. Padang
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Kehutanan (Distanhor Kehut). 2009 Kabupaten Padang Pariaman.
- Goenadi, D, et. al. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao Di Indonesia*. [Jurnal]. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian 1 :12-13. <http://www.pard.com/art-perkebunan/> Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao Di Indonesia. [15 Maret 2011].
- Hermanto, R. 2006. *Rancangan Kelembagaan Petani Dalam Implementasi Prima Tani Di Sumatera Selatan*. [Jurnal]. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 110-125. <http://digilib.unsri.ac.id/download/isu5-2b>. [11 Agustus 2010].
- Hermanto, R. 2008. *Membangun Sistem Agribisnis*. [Jurnal]. Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta. Disampaikan pada Seminar Mahasiswa pada tanggal 20 Desember 2006. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. <http://id.wordpress.com/tag/membangun-sistem-agribisnis/>. [26 Mei 2011].
- Hernanto, F. 1989. *Ilmu Usahatani*. PT Penebar Swadaya. Jakarta
- Iqbal, M dan Dalimi, A. 2006. *Kebijakan Pengembangan Agribisnis Kakao Melalui Primatani, Kasus Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan*. [jurnal]. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor. <http://ipse.litbag.deptan.go.id>. [2 Maret 2010]

- Ismawan, B. 2003. *Artisipasi dan Dimensi Keswadayaan: Pengalaman LSM Membangun Keswadayaan Masyarakat*. [Artikel - Th. II - No. 3 - Mei 2003]. Ketua Yayasan Bina Swadaya, Sekretaris Jenderal Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro) Indonesia dan Sekjen HKTI. <http://ekonomirakyat.org/artikel-ismawan.php>. [08 Juli 2011]
- Israel, A. 1990. *Pengembangan Kelembagaan*. Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia. LP3S. Jakarta
- Januar, J. 2007. *Keragaan Kelembagaan Agribisnis Jeruk Siam di Kabupaten Jember* [Jurnal]. Aspirasi, Vol.XVII, No. 2 Desember 2007. Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. <http://keragaan.kelembagaan.agribisnis.blogspot.com/JaniJanuar>. [8 Februari 2011].
- Lexi, J, M. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Kartonegoro, S. 1994. *Manajemen Organisasi*. Widya Press. Jakarta.
- Kote dan Yohanes. 2008. Pemantapan Kelembagaan Pada Gabungan Kelompok Tani. [Jurnal]. <http://puslitsosekhut.web>. [15 Maret 2009].
- Moenir. 2000. Pengertian Sarana dan Prasarana. [Jurnal]. <http://id.shvoong.com/tags/pengertian-sarana-prasarana>. [2 Juni 2011]
- Mosher, A, T. 1973. *Menggerakkan dan membangun pertanian*. Yasaguna. Jakarta
- Nababan, A dan Raden, B. 2002. *Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat, Antara konsep dan realitas*. <http://www.cifor.cgor.org> [9 april 2005]
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian. 2007. *Pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani*. [http://kelembagaandas.word press.com/](http://kelembagaandas.wordpress.com/). [11 Agustus 2010].
- Prabowo, Y. 2007. *Teknik Budidaya Agrokomplek: Budidaya Kakao*. <http://teknis-budidaya.blogspot.com/2007/10/budidaya-kakao.html>. [24 Februari 2010].
- Rahman, B, et al. 2008. *Evaluasi Kebijakan Subsidi dan Distribusi Sistem Distribusi dan Efektivitas Het Pupuk di Tingkat Petani*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Sadikin, et.al. 2004. *Kajian kelembagaan agribisnis dalam mendukung Pengembangan sistem usaha pertanian berbasis agroekosistem*. [Jurnal]. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Bogor. <http://ejoernal.unud.ac.id>. [15 Juni 2010].
- Said, E, G dan Intan, A, H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Saptana, *et.al.* 2001. *Kinerja Kelembagaan Agribisnis Beras Di Jawa Barat.* [Jurnal]. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. <http://pse.litbang.deptan.go.id>. [15 Juni 2010]
- Saptana, *et.al.* 2004. *Integrasi kelembagaan forum kass dan program agropilitan dalam rangka pengembangan agribisnis sayuran sumatera.* <http://pse/litbang.deptan.go.id> [15 Juni 2010]
- Syahyuti. 2007. *Kelembagaan dan Lembaga dalam Pengembangan Agribisnis Pedesaan.* <http://geocities.com/syahyuti> [02 Desember 2010].
- Sigit, S. 1999. *Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis, Manajemen.* Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyanto Taman Siswa. Yogyakarta
- Soeharjo, A dan Patong, D. 1973. *Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usahatani.* Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB. Bogor
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekartawi. 1995. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya.* PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta
- Soetrisno, L. 2006. *Paradigm Baru Pembangunan pertanian : Sebuah Tinjauan Sosiologis.* Kanisius. Yogyakarta
- Suswono, 2011. Menteri Pertanian Indonesia. *Peraturan menteri pertanian Nomor : 06/permentan/sr.130/2/2011 Tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi (het) pupuk bersubsidi untuk Sektor pertanian tahun anggaran 2011.* Jakarta. [9 April 2011].
- Syahza, A. 2007. Percepatan Peningkatan Ekonomi Perdesaan Melalui Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Perdesaan. Lembaga Penelitian Universitas Riau. <http://almasdi.unri.ac.id>. [18 Juni 2010].
- Syahza, A. 2007. *Koperasi Pedesaan.* [Jurnal]. Lembaga Penelitian Universitas Riau. <http://www.agrina-online.com>. [8 Februari 2011]
- Taib, G. 2003. *Kajian. Kelembagaan Pada Industri Crude Palm Oil Skala Kecil di Sumatera Barat.* Staf Pengajar Program Studi Budidaya Teknologi Pangan. [Jurnal Penelitian Lumbang, Vol 2 No. 2]. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Padang.
- Tumpal, H, S, *et.al.* 1988. *Budidaya, Pengolahan Dan Pemasaran Coklat.* Penebar Swadaya. Jakarta
- Usman, R dan Abdi. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi).* Alfabeta. Jakarta.
- Wijaya, D. 2006. Kakao masih jadi komoditi andalan. www.BisnisIndonesia.com.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi.* Andi Offset. Yogyakarta
- Yasin, A.Z.F. 2002. *Masa Depan Agribisnis Riau.* Unri Press. Pekanbaru.

_____. 2000. *SK. Mentan No. 940/Kpts/O1210/1097 Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*. [Jurnal]. Lembar Informasi Pertanian (LIPTAN) LPTP Koya Barat, Irian Jaya No. 03/2000. Diterbitkan oleh: Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Koya Barat. Jl. Yahim – Sentani – Jayapura. [7 September 2007].